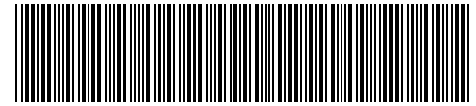




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : SP DIPA- 115.01.2.686421/2019**



DS:3833-9138-5485-9789

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
3. Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
4. Kode>Nama Satker : (686421) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA
- Sebesar : Rp. 180.513.381.000 (SERATUS DELAPAN PULUH MILIAR LIMA RATUS TIGA BELAS JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 01 PELAYANAN UMUM
01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

		Jumlah Uang	
115.01.06	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	Rp.	180.513.381.000
115.01.06.5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Rp.	180.513.381.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	180.513.381.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M A N A D O (049) Rp. 180.513.381.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Jakarta, 05 Desember 2018
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 115.01.2.686421/2019
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:3833-9138-5485-9789

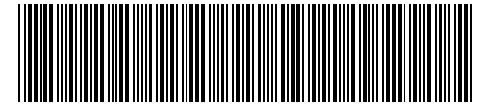
Kementerian Negara/Lembaga : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (686421) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA

Kuasa Pengguna Anggaran : GREITY TUTUROONG, S.Sos, M.AP
Bendahara Pengeluaran : FIRSLY RATTU, SE
Pejabat Penanda Tangan SPM : ESTER LOMBOGIA, ST, ME

Halaman : IA.1

1 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM			180.513.381.000
Sub Fungsi	01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI			180.513.381.000
2 Program	115.01.06	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu			180.513.381.000
Sasaran Program	01	Meningkatnya kualitas pencegahan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa Pemilu			
	02	Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pemilu			
Indikator Kinerja Program	01	Persentase peningkatan jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu	5	%	
	02	Menurunnya jumlah pelanggaran Pemilu	10	%	
	03	Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran pemilih yang ditindaklanjuti	5	%	
	04	Persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	100	%	
	05	persentase penyelesaian sengketa yang dilayani dengan baik	90	%	
	06	Persentase tindaklanjut penyelesaian sengketa	100	%	
	01	Persentase kasus pelanggaran kode etik yang diselesaikan	100	%	
Output Program	01	Pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilu			
Indikator Output Program	01	Persentase penanganan pelanggaran yang diselesaikan	100	%	
Kegiatan	5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc			180.513.381.000
Sasaran Kegiatan	04	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota			
	02	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota			
	03	Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi			
	04	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri			
	05	Persentase pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu			
	06	Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan			
	07	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 115.01.2.686421/2019
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:3833-9138-5485-9789

Kementerian Negara/Lembaga : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (686421) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA

Kuasa Pengguna Anggaran : GREITY TUTUROONG, S.Sos, M.AP
Bendahara Pengeluaran : FIRSLY RATTU, SE
Pejabat Penanda Tangan SPM : ESTER LOMBOGIA, ST, ME

Halaman : IA.2

		dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu			
Output Kegiatan	5245.001	Layanan Administrasi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	16 Laporan/ Dokumen		7.221.145.000
Indikator Output Kegiatan	01	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	%	
Output Kegiatan	5245.002	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	16 Laporan/ Dokumen		17.349.629.000
Indikator Output Kegiatan	01	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	%	
Output Kegiatan	5245.003	Teknis Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilu [PN]	18 Laporan/ Dokumen		34.331.563.000
Indikator Output Kegiatan	01	Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	100	%	
Output Kegiatan	5245.004	Layanan Teknis dan Administrasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Lembaga Ad-Hoc [PN]	3 Laporan/ Dokumen		57.786.200.000
Indikator Output Kegiatan	01	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	100	%	
Output Kegiatan	5245.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2 Layanan		2.481.000.000
Indikator Output Kegiatan	02	Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi = xx unit	340	Unit	
	03	Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit	340	Unit	
	04	Luas Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2	3400	M2	
	01	Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor = xx unit	0	Unit	
Output Kegiatan	5245.994	Layanan Perkantoran	2 Layanan		61.343.844.000
Indikator Output Kegiatan	01	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100	%	

Jakarta, 05 Desember 2018
Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu

ttd.
Gunawan Suswantoro
NIP 196606301993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 115.01.2.686421/2019
II. RINCIAN PENGELUARAN**



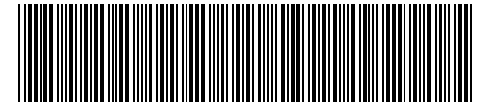
DS:3833-9138-5485-9789

Kementerian Negara/Lembaga : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (686421) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686421	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA	25.277.975	152.416.636	2.818.770	-	-	180.513.381		
115.01.06	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	25.277.975	152.416.636	2.818.770	-	-	180.513.381		
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	25.277.975	152.416.636	2.818.770	-	-	180.513.381		
5245.001	Layanan Administrasi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	-	6.883.375	337.770	-	-	7.221.145	17 . 51	
01	RM	-	6.883.375	337.770	-	-	7.221.145	049	
5245.002	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	-	17.349.629	-	-	-	17.349.629	17 . 51	
01	RM	-	17.349.629	-	-	-	17.349.629	049	
5245.003	Teknis Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilu [PN]	-	34.331.563	-	-	-	34.331.563	17 . 51	
01	RM	-	34.331.563	-	-	-	34.331.563	049	
5245.004	Layanan Teknis dan Administrasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Lembaga Ad-Hoc [PN]	-	57.786.200	-	-	-	57.786.200	17 . 51	
01	RM	-	57.786.200	-	-	-	57.786.200	049	
5245.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	2.481.000	-	-	2.481.000	17 . 51	
01	RM	-	-	2.481.000	-	-	2.481.000	049	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 115.01.2.686421/2019
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3833-9138-5485-9789

Kementerian Negara/Lembaga : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (686421) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5245.994	Layanan Perkantoran	25.277.975	36.065.869	-	-	-	61.343.844	17 . 51	
01	RM	25.277.975	36.065.869	-	-	-	61.343.844	049	
JUMLAH		25.277.975	152.416.636	2.818.770	-	-	180.513.381		

Jakarta, 05 Desember 2018
Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu

ttd.
Gunawan Suswanto
NIP 196606301993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 115.01.2.686421/2019
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:3833-9138-5485-9789

Kementerian Negara/Lembaga : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (686421) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA

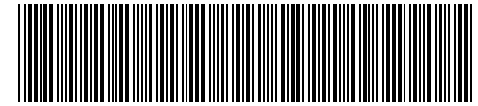
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	686421	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	2.890.024	4.695.665	7.204.197	10.544.160	10.892.300	12.969.705	19.564.953	18.962.909	21.162.588	19.947.442	22.969.029	28.710.409	180.513.381
		51 BELANJA PEGAWAI	1.476.234	1.498.984	1.632.957	2.077.850	1.994.432	3.068.746	2.388.769	2.206.767	2.980.273	1.463.595	2.229.517	2.259.851	25.277.975
		52 BELANJA BARANG	1.402.233	3.109.299	5.456.516	8.352.432	8.779.198	9.754.665	16.933.488	16.476.238	17.863.230	18.229.030	20.408.588	25.651.719	152.416.636
		53 BELANJA MODAL	11.557	87.382	114.724	113.878	118.670	146.294	242.696	279.904	319.085	254.817	330.924	798.839	2.818.770
	115.01.06.5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	2.890.024	4.695.665	7.204.197	10.544.160	10.892.300	12.969.705	19.564.953	18.962.909	21.162.588	19.947.442	22.969.029	28.710.409	180.513.381
		51 BELANJA PEGAWAI	1.476.234	1.498.984	1.632.957	2.077.850	1.994.432	3.068.746	2.388.769	2.206.767	2.980.273	1.463.595	2.229.517	2.259.851	25.277.975
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.402.233	3.109.299	5.456.516	8.352.432	8.779.198	9.754.665	16.933.488	16.476.238	17.863.230	18.229.030	20.408.588	25.651.719	152.416.636
		53 BELANJA MODAL	11.557	87.382	114.724	113.878	118.670	146.294	242.696	279.904	319.085	254.817	330.924	798.839	2.818.770

Jakarta, 05 Desember 2018
Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu

ttd.
Gunawan Suswantoro
NIP 196606301993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 115.01.2.686421/2019
IV A. B L O K I R**



DS:3833-9138-5485-9789

Kementerian Negara/Lembaga : [115] BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [686421] SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2018
Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu

ttd.
Gunawan Suswanto
NIP 196606301993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 115.01.2.686421/2019
IV B. C A T A T A N**



DS:3833-9138-5485-9789

Kementerian Negara/Lembaga : [115] BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [686421] SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2018
Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu

ttd.
Gunawan Suswanto
NIP 196606301993031001